

GENDER BUDGET STATEMENT
(Pernyataan Anggaran Gender)

OPD : BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA PADANG PANJANG
TAHUN ANGGARAN : 2024

PROGRAM	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
KODE PROGRAM	5.01.02
ANALISA SITUASI	<p>1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dasar penyusunan perencanaan pembangunan daerah yakni UU No 25 tahun 2004 dan Permendagri No 86 tahun 2017, mengamanatkan bahwa penyusunan dokumen perencanaan menggunakan pendekatan top down, bottom up, teknokratik, politis, aspiratif. - Musrenbang salah satu instrumen untuk menjawab pendekatan bottom up dan aspiratif - Kondisi saat ini pada RKPD tahun 2022 dan 2023 porsi terkait dengan isu-isu gender antara lain : disabilitas, lansia, pemuda, anak, kepala rumah tangga miskin, perempuan (janda), dll masih minim. - Usulan masyarakat lebih banyak di bidang fisik prasarana, usulan yang menjadi kebutuhan mayoritas perempuan, lansia maupun disabilitas masih jarang - Komposisi jenis kelamin 61,5% laki-laki dan 38,5% perempuan. - Komposisi elemen yang hadir pemerintah 45%, swasta 3%, masyarakat 52% (ormas, LSM) - Komposisi peserta dari kelompok umur anak-anak (0-18 tahun) 3% pemuda (18 – 30 th) 16% dewasa (30 – 60 th) 76% lansia (60 th ke atas) 5% - Tingkat kehadiran disabilitas pada pelaksanaan musrenbang tahun 2020 dan 2021 <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <p>a. Faktor Kesenjangan</p> <p>Akses</p> <ul style="list-style-type: none"> - Undanguan tidak menjangkau semua komponen masyarakat <p>Partisipasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Partisipasi perempuan lebih sedikit dibanding laki-laki - Usulan perwakilan kelurahan dan kecamatan didominasi laki-laki <p>Kontrol</p> <p>Musrenbang hanya sebatas memenuhi amanat dalam penyusunan dokumen perencanaan</p> <p>Manfaat</p> <p>Porsi pengalokasian anggaran lebih banyak ditentukan oleh pendekatan top down dan politik.</p> <p>b. Penyebab Internal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengelola kegiatan belum responsif gender - Minimnya pelaksanaan sosialisasi, informasi dan edukasi kepada komponen masyarakat terkait penyusunan perencanaan responsive gender - Pengusulan kegiatan baru tidak dapat dilakukan apabila tidak masuk dalam e-planning - Dengan pemberlakuan PPKM maka kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan perencanaan <p>Penyebab EKsternal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidak semua kelompok masyarakat memiliki alamat yang jelas untuk dihubungi - Pelaksanaan kegiatan musrenbang lebih mengutamakan seremonial daripada substansi pembahasan - Tingkat kehadiran pemangku kebijakan/ dan DPRD masih sedikit - Makin tingginya tingkat pengawasan pada penyusunan perencanaan - Masih minimnya informasi yang dimiliki masyarakat terkait dengan prioritas pembangunan dan kewenangan masing-masing pemerintah daerah - Musrenbang belum dianggap sebagai sesuatu hal yang penting untuk didukung oleh penganggaran yang maksimal - Domain politik dalam penyusunan penganggaran lebih dominan

CAPAIAN PROGRAM	1. Tolak Ukur Terakomodirnya usulan masyarakat berbasis gender dalam dokumen perencanaan		
	2. Indikator dan Target Kinerja Terakomodirnya perencanaan pembangunan berbasis gender		
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM	Rp. 70.000.000,-		
RENCANA AKSI	Sub Kegiatan 1	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	
		Masukan	Rp. 70.000.000,-
		Keluaran	Jumlah kegiatan yang responsive gender dalam musrenbang
		Hasil	Terakomodirnya perencanaan pembangunan berbasis gender

Padang Panjang, 20 Maret 2023

**KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KOTA PADANG PANJANG**

RUSDIANTO, S.IP, MM

Pembina Utama Muda NIP. 19640402 198602 1 003

GENDER BUDGET STATEMENT
(Pernyataan Anggaran Gender)

OPD : **BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA PADANG PANJANG**
TAHUN ANGGARAN : **2024**

PROGRAM	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
KODE PROGRAM	5.01.03
ANALISA SITUASI	<p>1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 yang mengamanatkan setiap pemerintah daerah membentuk Pokja PUG yang salah satu tugasnya menyusun perencanaan dan penganggaran yang Responsif Gender. - Kondisi saat ini di Kota Padang Panjang Pelaksanaan PPRG belum berjalan maksimal ditandai dengan Pokja PUG baru sebatas SK - Pemahaman Kepala OPD terkait dengan PUG belum Optimal - PUG masih dianggap sebagai tugas tambahan - Fokal Point dimasing OPD belum berjalan optimal ditandai dengan belum semua OPD mempromosikan PUG di masing masing OPD dan PUG belum dianggap sebagai kebutuhan - Belum semua OPD menindaklanjuti terkait Rekomendasi Kebijakan yang dikeluarkan Walikota Padang Panjang untuk mencantumkan Dasar Hukum, data terpilah dan issue gender di dalam Renstra OPD
	<p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <p>a. Faktor Kesenjangan</p> <p>Akses</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terbatasnya informasi terkait dengan PUG dan PPRG - Kurangnya pemahaman ASN tentang PUG dan PPRG <p>Partisipasi</p> <p>Komitmen Kepala OPD masih kurang ditandai dengan minimnya kehadiran pada pelaksanaan Sosialisasi atau dalam menindaklanjuti dalam penyusunan GAP dan GBS</p> <p>Kontrol</p> <p>Manfaat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Manfaat penerapan GAP GBS dan penurunan stunting tidak langsung terasa - Belum semua OPD merasakan manfaat pelaksanaan GAP DBS <p>b. Penyebab Internal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum menjadi prioritas dalam pelaksanaan tugas OPD tentang pentingnya PUG <p>c. Penyebab Eksternal</p> <ul style="list-style-type: none"> - PUG dianggap tidak menarik dan dianggap hanya mengurus masalah perempuan saja - Masih kurangnya partisipasi stakeholders dalam mendukung PUG
CAPAIAN PROGRAM	<p>3. Tolak Ukur Terwujudnya perencanaan yang responsif gender</p>
	<p>4. Indikator dan Target Kinerja</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Terlaksananya penganggaran yang responsive gender b. Terwujudnya pengarusutamaan gender Kota Padang Panjang
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM	Rp. 35.000.000,-

RENCANA AKSI	Sub Kegiatan 1	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
		Masukan	Rp. 35.000.000,-
		Keluaran	Penganggaran yang Responsif Gender
		Hasil	Terwujudnya Pengarusutamaan Gender di Kota Padang Panjang

Padang Panjang, 20 Maret 2023

**KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KOTA PADANG PANJANG**

RUSDianto, S.IP, MM

Pembina Utama Muda NIP. 19640402 198602 1 003